



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BISUKMA KURNIAWATI
2. Jabatan : STAF AHLI WALIKOTA BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 718735

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.356.620.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/70 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/320 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 1.731.620.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 799.700.000

1. MOTOR, YAMAHA 2 DP NMAX 155 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.800.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS CROSS GR HYBRID BLACK Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 428.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 850.066.693

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.206.986.693

III. HUTANG Rp. 167.670.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.039.316.693

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.